



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 4/ORT.07/6112/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
Menetapkan : TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022.

Menetapkan . . .

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

KESATU

: Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

:

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**
Alamat : Jalan Adisucipto KM, 15,2 Sungai Raya

Telp. 0561 - 6726899

Fax. 0561 – 6726899

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022**

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Manajemen Perubahan																		
1. Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi Di Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan 4) Tim Assessor	Surat Keputusan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kubu Raya	√														
				1. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Kegiatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya				√									
				2. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	2. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya							√						
	2. Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;				√											
			2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kubu Raya di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan Unit Kerja;				√											
		2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;								√							√	

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;						√								
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan																		
1	Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan kerja	Penataan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan Unit kerja/Setuan Kerja	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Pengelolaan JDH	1. Pembangunan JDH Satuan Kerja 2. Pengelolaan JDH Satuan Kerja	1. Dapat dilaksanakannya JDH Satuan Kerja 2. Updatenya data JDH Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3. Penata Organisasi/Kelompok																		
1	Penguatan Kelengkapan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; 2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI dan Kememprian RB						√							√	
		2. Penyusunan SOTK	1. Dilaksanakannya Penyusunan SOTK KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai mandat. 2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya	1. SOTK KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai mandat. 2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya			√										Tertatif	
							√										Tertatif	
4. Penata Tata Laksana																		
1	Penguatan Tata laksana	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; 2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; 3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis; 2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan 4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi 1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP; 2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP; 3. SOP sudah di legalikan; dan 4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.	√													Tertatif
								√										
								√										
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti															
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya:																
			1. Penyempurnaan Kebijakan/ Maksud Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja	1. Adanya kebijakan pendukung PID;	√														
			2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja;	2. Dapat diaksesnya Maksud Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;	√														
			3. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan satuan kerja;	3. Meningkatnya kepuasan layanan PID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjut;	√	√	√												
			5. Survei kepuasan pemohon informasi	5. Jumlah sengketa informasi;	√	√	√												
				6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7. Indeks kepuasan pemohon informasi.	√	√	√												
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya: 1) Pembangunan aplikasi inovatif/transparansi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di KPU Kabupaten Kubu Raya lain; 2) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; 3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi; 4) Pemanfaatan aplikasi berbagi paket (contoh: e-proc/LPSE, e- budgeting.	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE															
				2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)									√						
				3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;									√	√	√	√	√	√	
				4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;									√	√	√	√	√	√	
				5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya									√						
				6. Jumlah aplikasi berbagi paket yang dimanfaatkan									√						
			2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi sekretariat:																
			1) Aplikasi tata naskah dinas	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;									√	√	√	√	√	√	
			2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian	2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.									√	√	√	√	√	√	
			3) Aplikasi Perencanaan	3. Tersinya data aplikasi Manajemen Perencanaan									√	√	√	√	√	√	
			4) Aplikasi penganggaran	4. Tersinya data aplikasi Penganggaran									√	√	√	√	√	√	
			5) Aplikasi Keuangan	5. Tersinya data aplikasi Manajemen Keuangan									√	√	√	√	√	√	
			6) Aplikasi Manajemen Kinerja	6. Tersinya aplikasi manajemen kinerja									√	√	√	√	√	√	
			7) Aplikasi Pengadaan	7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan									√	√	√	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			8) Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3) Layanan Whistle Blowing System (WBS) 4) Layanan Kepemiluan 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Dapat dilaksanakannya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan; 2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDH Sekretariat) yang selalu diperbaharui; 3. Dapat dilaksanakannya WBS oleh stakeholder, SOP dan jumlah pelapor/Laporan Pengaduan; 4. Jumlah Jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi 5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPD Satuan kerja oleh publik.															
		4. Penerapan sistem arsip yang handal	1) Penerapan sistem arsip 2) Kerjasama dengan arsip daerah 3) Pembangunan JF Anaparis di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Terkololnya arsip statis/dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; 2. Terkololnya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 3. Tardokumentasinya arsip vital 4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Anaparis															
5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia																			
1.	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu 2. Penerapan asesment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai 3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK) 5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya) 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/Cascading 4) Pengukuran periodik Sasaran Kinerja Individu 5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SIP 6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment 1) Data Mutasi 2) Data Promosi 3) Data Peserta Assessment 1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah Pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah diborkan sanksi/hukuman Tersedianya dokumen Analisa Beban Kerja 1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi															

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6. Penguatan Akuntabilitas																	
1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja																	
		1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja	√												
			2. Revisi Renstra Satuan Kerja	Renstra hasil revisi	√												
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	1. Adanya dokumen penetapan kinerja hingga level Eselon IV 2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishment 3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	√												
			4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya	% Capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya												√	
			6. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya 2. Revisi LKIP KPU Kabupaten Kubu Raya	√												
			7. Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tepat waktu		√											
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;	1. Terselainya aplikasi e- Lapkin 2. Data e-Lapkin KPU Kabupaten Kubu Raya termutakhir		√											
			2. Pelatihan SOM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPB bersertifikat						√							Tentatif
			3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN 2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3) JF Perencana	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN 2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana							√						Tentatif
7. Pengawasan																	
1. Penguatan Pengawasan																	
		1. Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; 2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;	1. Terbentuknya Tim Zona Integritas; Di tetapkan timnya Piagam Integritas oleh para pihak dan selanjutnya; dan Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam penilaian WBS/WBRM. Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalikan.			√										
						√											

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
			3. Pelaksanaan Rencana awal Zone Integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zone Integritas di dalam Rencana Aksi Zone Integritas; dan 2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zone Integritas			√														
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zone Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI 3. Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah ditetapkan			√														
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zone Integritas (LKE ZI)	1. Tersinya LKE ZI; dan 2. Tersinya PMPRB ZI bagi KPU Kabupaten Kubu Raya yang di tunjuk		√															
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); 2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi; 3. Public Campaign Anti Gratifikasi; 4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; dan 3. Tenda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal; 1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	√																
			3. Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1. Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 2. Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik 2. Adanya SOP WBS 3. Adanya Pengeloa WBS Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.																
			4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. 2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. % Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan; Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.																
			5. Peningkatan SPPI di lingkungan KPU Kubu Raya	1. Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya 2. Pelaksanaan SPPI: 1) Lingkungan pengendalian	Adanya tim SPPI pada satuan kerja Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
																					Tentatif

